

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian secara umum sistem pengendalian intern telah diterapkan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT walaupun penerapannya belum optimal. Namun masih terdapat temuan BPK dari audit Laporan Keuangan Tahun 2019 yang menunjukkan bahwa pengendalian intern atas aset tetap masih lemah, berikut simpulan pada setiap unsur pengendalian intern:

#### 1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian sudah diterapkan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT yang memberikan suasana positif sehingga mendukung dalam kegiatan bekerja sehari-hari.

#### 2. Penilaian Risiko

Dalam penilaian risiko, masih terdapat risiko yang diidentifikasi dalam pengelolaan aset yaitu pada tahap penatausahaan yang belum tertib, pengujian fisik yang belum dapat dijelaskan dan perbedaan nilai aset tetap, sehingga mengenai informasi aset tetap belum lengkap dan akurat.

#### 3. Aktivitas Pengendalian adalah kegiatan pengendalian yang dituangkan dan melekat dalam bentuk kebijakan dan prosedur kegiatan yang belum dilakukan secara baik, seperti:

a. Review kinerja masih menemukan kelemahan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja dan kesalahan dalam data/informasi.

- b. Pengendalian pengelolaan sistem informasi belum dilakukan dengan baik dimana kebijakan disalahgunakan sehingga menyebabkan kecurangan dalam peng-inputan data.
- c. Pembinaan sumber daya manusia masih kurangnya kompetensi, dan bimbingan.
- d. Pengendalian fisik aset belum dilakukan secara efektif
- e. Transaksi yang terjadi diotorisasi oleh pihak yang tidak berwenang mengakibatkan salah penginputan data sehingga terjadinya ketidakcocokan data dalam sistem dengan keadaan yang sebenarnya.
- f. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu belum dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tanggungjawab dalam pencatatan yang akurat atas transaksi dan kejadian

Selain itu, tahapan pengelolaan barang milik daerah telah dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah Daerah, namun masih mengalami kendala pada tahap pengamanan dan penatausahaan.

- 4. Informasi dan komunikasi belum memadai, dimana pemerintah kurang memberikan informasi tentang keberadaan aset tetap. Hal tersebut terlihat dari kurangnya kontrol untuk setiap aset, sehingga aset tetap yang disajikan di dalam laporan keuangan belum menyajikan nilai buku (*book value*) dari aset tersebut.
- 5. Pemantauan, belum dilaksanakan secara baik sehingga perlu pertanggungjawaban penuh dalam usaha pengawasan internal terhadap aset tetap. Manajemen perlu memperhatikan dan menentukan cara yang baik dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan efisien agar

pelaksanaan pemantauan secara periodik dan berkelanjutan.

## 6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka disarankan kepada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, untuk memperhatikan unsur-unsur sistem pengendalian intern terhadap aset tetap yaitu:

1. Perlunya dilakukan analisis risiko dengan menerapkan kebijakan untuk memastikan berkurangnya risiko yang telah teridentifikasi pada penilaian risiko
2. Dalam aktivitas pengelolaan barang milik daerah perlu adanya koordinasi dan pengawasan dalam merencanakan kebutuhan barang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.
3. Dalam informasi dan komunikasi perlu dilakukan koordinasi secara rutin sehingga informasi mengenai aset tetap selalu *Up To date*. Manajemen perlu memberikan informasi tentang keberadaan aset tetap, sehingga pencatatan aset tetap yang mendukung laporan keuangan secara lengkap dan terjamin keandalannya serta dilakukan rekonsiliasi secara berkala untuk mengidentifikasi terjadinya kesalahan dalam pencatatan mengenai aset tetap sejak dini.
4. Meningkatkan kegiatan pemantauan aset, perlu bertanggungjawab penuh dalam usaha pengawasan internal terhadap aset tetap. Manajemen perlu memperhatikan dan menentukan cara yang baik dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan efisien agar dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan. Dimana untuk mencapai tujuan dari pengendalian intern harus memberikan keyakinan memadai bagi

tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2011. *"Sistem Akuntansi Sektor Publik"*. Jakarta:Salemba Empat
- Baridwan, Zaki. 2004. *Intermediate Accounting "Pengantar Akuntansi"*, Buku 2, Edisi 21. Jakarta:Salemba Empat
- Bintang Santri Br, Panjaitan (2019) Pengendalian Intern atas Aset Tetap pada Kantor Pemerintah Pangulu Pematang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. Skripsi Jurusan Akuntansi Universitas HKBP Nommensen. Diakses 10 April 2021  
<http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/3492>
- Halim, Abdul. 2012. *"Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah"*. Jakarta:Salemba Empat
- Jenni Napitupulu (2018) Pengendalian Intern Aset Tetap pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Medan. Skripsi Jurusan Akuntansi Universitas HKBP Nommensen. Diakses 28 April 2021  
<http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/1520>
- Kurniawan, Topan. (2013) Analisis Sistem Pengendalian Intern Aset Tetap Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Kabupaten Musi Bayuasin. Skripsi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang. Diakses 21 April 2021  
<http://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1232/1/1>
- Madesen, Karamoy (2018) Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap BMD Pemerintah Kota Bitung. Skripsi Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi. Diakses 19 April 2021  
<https://doi.org/10.35800/jjs.v9i2.26470>
- Mulyadi. 2001. *"Sistem Akuntansi"*. Jakarta:Salemba Empat
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang *"Sistem Pengendalian Intern Pemerintah"*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *"Standar Akuntansi Pemerintah"*
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang *"Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah"*
- Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 *"Pengelolaan Barang Milik Daerah"*

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 7 Tentang “*Akuntansi Aset tetap Tetap*”

Romney, Steinbart (2014) “Tujuan Pengendalian Intern”